

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data bertujuan untuk menjelaskan gambaran hasil penelitian secara umum. Pada penelitian ini data yang akan dipaparkan adalah dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas (X) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat, di penelitian ini variabel bebas terdiri dari indikator kapasitas pengeluaran dan kapasitas pendapatan sebagai gambaran untuk melihat desentralisasi fiskal di 16 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Variabel terikat (Y) atau variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2010 pada masing-masing 16 kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini hasil olahan deskripsi data pada *Eviews 8.0*:

Tabel IV. 1
Statistik Deskriptif Variabel

	PDRB	EXPI	REVI
Mean	13.15318	4.156224	9.648487
Median	13.01846	3.991380	8.882435
Maximum	13.90366	8.001443	21.10901
Minimum	12.45561	1.415588	4.323385
Std. Dev.	0.389660	1.683991	3.606258
Skewness	0.109672	0.355263	1.165130
Kurtosis	2.080622	2.655651	4.253604
Jarque-Bera	2.977890	2.078079	23.33879
Probability	0.225611	0.353794	0.000009
Sum	1052.254	332.4980	771.8790
Sum Sq. Dev.	11.99496	224.0303	1027.403
Observations	80	80	80

Sumber: data hasil olahan Eviews 8.0

Berdasarkan tabel IV.1 rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 16 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur sebesar 13.15318 dengan nilai tertinggi sebesar 13.90366 dan nilai terendahnya sebesar 12.45561. pada tabel diatas n atau jumlah yang di observasi pada penelitian ini sebesar 80, hal ini dikarenakan peneliti menggunakan 16 kabupaten/kota yang terdiri dari 14 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Jawa Timur sebagai pengukuran. Berikut 16 kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian:

Tabel IV. 2
Objek Penelitian Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten	Kota
1	Blitar	Blitar
2	Bojonegoro	Malang
3	Jember	Mojokerto
4	Lamongan	Batu
5	Madiun	
6	Magetan	
7	Malang	
8	Pamekasan	
9	Pasuruan	
10	Ponorogo	
11	Sampang	
12	Trenggalek	

Sumber: diolah penulis

1. Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur (Y)

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), adapun data pengukuran pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah masing-masing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 dari 14 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 hingga 2014. PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi dan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Berikut adalah data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel IV.3
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)

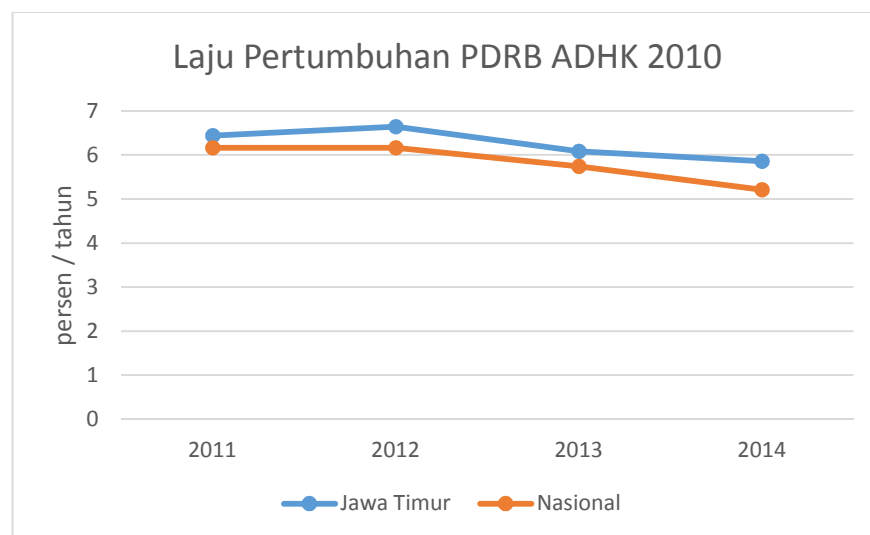
Kota/kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Blitar	16.213,9	17.093,9	18.054,5	18.965,2	19.915,3
Kab. Bojonegoro	33.291,9	36.751,0	38.136,1	39.039,4	39.934,4
Kab. Jember	33.375,5	35.208,2	37.262,0	39.519,2	41.968,8
Kab. Lamongan	1.6275,2	17.360,5	18.562,7	19.848,8	21.100,2
Kab. Madiun	8.119,7	8.608,7	9.135,7	9.654,2	10.169,7
Kab. Magetan	8.277,8	8.744,8	9.251,2	9.792,6	10.292,4
Kab. Malang	41.342,9	44.091,3	47.076,0	49.571,7	52.549,6
Kab. Pamekasan	6.994,2	7.429,4	7.894,0	8.375,2	8.846,2
Kab. Pasuruan	61.178,3	65.271,6	70.167,1	75.044,0	80.105,3
Kab. Ponorogo	8.961,5	9.472,2	10.038,4	10.554,5	11.104,1
Kab. Sampang	10.064,0	10.315,3	10.910,9	11.623,8	11.632,9
Kab. Trenggalek	7.962,1	8.435,2	8.959,5	9.496,7	9.998,4
Kota Blitar	2.855,0	3.038,4	3.236,6	3.446,8	3.649,6
Kota Malang	31.377,3	33.273,7	35.355,7	37.547,7	39.724,3
Kota Mojokerto	2.987,2	3.165,6	3.358,4	3.566,7	3.774,5
Kota Batu	6.504,4	6.968,0	7.473,6	8.018,6	8.572,1

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel IV.3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan kabupaten dimana PDRB nya paling tinggi diantara 16 kab/kot yang penulis jadikan objek penelitian. PDRB kabupaten Pasuruan meningkat cukup signifikan yakni dari tahun 2010 sebesar 61.178,3 miliar hingga pada 2014 sebesar 80.105,3 miliar. Sedangkan pada kab/kot yang memiliki PDRB terkecil diantaranya adalah kota Blitar dengan besaran pada 2010 sejumlah 2.855,0 miliar dan hingga 2014 hanya mencapai 3.649,6 miliar. Kota Pasuruan sebagai pemimpin PDRB pada objek penelitian ini

karena terkenal dengan kota industrinya dengan PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) dan Ngoro Industri Persada (NIP). Walaupun masing-masing kabupaten/kota berusaha menggenjot pertumbuhannya namun, beberapa kabupaten/kota terbentur dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian yang pertumbuhannya cenderung lebih rendah dibanding sektor industri pengolahan maupun sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang kue pembangunan terbesar ke dua dalam perekonomian nasional, setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi sebesar 14,40 persen pada tahun 2014. PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 1.262,70 triliun. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan di Jawa Timur tidak terlepas dari peran kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan sosial budaya yang berbeda antar wilayah.



Sumber: BPS, diolah penulis

Gambar IV. 1

Laju PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur Dibandingkan Nasional

2. Indikator Kapasitas Pengeluaran (X1)

Pada penelitian ini untuk menggambarkan desentralisasi fiskal penulis menggunakan indikator kapasitas pengeluaran sebagai perbandingan pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran daerah kab/kota ditambah provinsi. Data yang digunakan yaitu data pengeluaran atau belanja 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian dari tahun 2010 hingga 2014 dan data belanja Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Berikut ini adalah data belanja masing-masing kab/kota yang menjadi objek penelitian.

Tabel IV. 4

Belanja Daerah 16 Kabupaten/Kota Objek Penelitian (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Blitar	1.093.847	1.157.037	1.371.132	1.631.526	1.750.872
Kab. Bojonegoro	1.101.525	1.287.102	1.692.117	2.033.044	2.415.101
Kab. Jember	1.503.015	1.784.064	2.347.243	2.347.243	2.695.090
Kab. Lamongan	1.044.489	1.285.411	1.471.488	1.604.225	1.911.179
Kab. Madiun	769.220	871.704	1.025.752	1.140.028	1.313.183
Kab. Magetan	735.704	918.770	1.020.434	1.136.484	1.321.682
Kab. Malang	1.654.299	1.913.350	2.208.273	2.322.863	2.749.971
Kab. Pamekasan	754.567	924.138	1.098.542	1.165.792	1.383.026
Kab. Pasuruan	1.125.395	1.318.579	1.534.565	1.695.899	1.947.428
Kab. Ponorogo	908.838	1.059.035	1.263.003	1.395.545	1.624.975
Kab. Sampang	814.942	870.875	991.977	1.085.329	1.238.265
Kab. Trenggalek	799.557	935.917	1.041.202	1.161.539	1.365.576
Kota Blitar	417.915	533.328	518.217	594.595	659.079
Kota Malang	967.903	1.048.168	1.252.271	1.486.295	1.602.922
Kota Mojokerto	403.716	409.665	488.946	511.092	631.979
Kota Batu	400.761	435.856	435.189	551.750	612.860
Provinsi Jawa Timur	6.179.313	7.774.107	10.982.257	12.670.706	12.708.930
Total	20.675.006	24.527.107	30.742.607	34.533.953	37.932.120

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah penulis)

Dari tabel IV. 4 diatas, dapat diketahui daerah yang memiliki belanja atau pengeluaran paling sedikit adalah kota batu sebesar 400.761 miliar pada tahun 2010 dan hingga pada 2014 mencapai 612.860 miliar. Sedangkan kabupaten yang

belanjanya terbesar adalah Kabupaten Malang sebesar 1.654.299 triliun pada tahun 2010 dan mencapai 2.749.971 triliun pada 2014. Dan pada tingkat provinsi, Provinsi Jawa Timur tentu menjadi yang paling tinggi karena pusat dari Jawa Timur itu sendiri dimana pada tahun 2010 sebesar 6.179.313 triliun dan pada 4 tahun berikutnya yakni 2014 naik dua kali lipat yakni sebesar 12.709.930 triliun.

3. Indikator Kapasitas Pendapatan (X2)

Pada indikator kapasitas pendapatan, untuk menggambarkan desentralisasi fiskal digunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi Total Pendapatan Daerah (TPD). PAD masing-masing 16 kab/kota objek penelitian dari tahun 2010-2014 disajikan sebagai berikut.

Tabel IV. 5
Pendapatan Asli Daerah/PAD (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Blitar	63.889	76.191	95.782	115.671	188.827
Kab. Bojonegoro	79.891	164.586	159.248	215.766	291.245
Kab. Jember	150.936	182.494	255.805	308.377	440.462
Kab. Lamongan	95.245	99.546	129.285	161.088	272.409
Kab. Madiun	45.034	57.998	68.546	83.429	121.391
Kab. Magetan	51.965	61.761	78.423	87.860	141.163
Kab. Malang	130.466	172.333	197.254	262.267	411.185
Kab. Pamekasan	49.313	70.705	84.377	89.463	171.518
Kab. Pasuruan	100.309	155.277	194.859	278.165	421.443
Kab. Ponorogo	48.665	65.937	108.766	134.097	198.730
Kab. Sampang	36.396	46.974	61.065	66.415	123.039
Kab. Trenggalek	53.554	63.084	70.198	77.800	132.951
Kota Blitar	47.691	52.564	63.641	72.854	102.758
Kota Malang	113.490	185.819	229.810	317.773	372.545
Kota Mojokerto	31.596	42.165	53.440	74.944	105.277
Kota Batu	17.736	30.242	38.794	59.545	80.494

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah penulis)

Pada tabel IV.5 menunjukkan besarnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD masing-masing kab/kota objek penelitian dari tahun 2010 hingga 2014. PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber langsung dari hasil pengelolaan keuangan daerah tanpa adanya dana bantuan dari pusat, sehingga PAD dapat mencerminkan kinerja daerah dalam menggali sendiri potensi keuangan yang dimiliki daerah tersebut. PAD yang paling rendah pada 16 kab/kota objek penelitian adalah kota batu sebesar 17.736 miliar pada tahun 2010 namun berhasil naik hampir 4 kali lipat hingga tahun 2014 sebesar 80.494 miliar. Selanjutnya Kabupaten Jember menjadi kabupaten yang paling tinggi PAD nya diantara 16 kab/kota objek penelitian yakni sebesar 150.936 miliar pada tahun 2010 dan mencapai 440.462 miliar rupiah pada tahun 2014. Sedangkan TPD masing-masing 16 kab/kota objek penelitian dari tahun 2010-2014 disajikan sebagai berikut.

Tabel IV. 6
Total Pendapatan Daerah/TPD (jutaan rupiah)

	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Blitar	1.089.237	1.237.994	1.380.533	1.604.230	1.927.712
Kab. Bojonegoro	1.218.577	1.508.115	1.861.388	2.024.348	2.517.680
Kab. Jember	1.539.990	1.882.284	2.146.090	2.366.371	2.797.469
Kab. Lamongan	1.064.028	1.321.525	1.472.426	1.674.656	1.969.783
Kab. Madiun	831.986	896.044	1.029.699	1.182.865	1.386.252
Kab. Magetan	800.187	951.988	1.083.875	1.225.384	1.471.813
Kab. Malang	1.665.126	1.950.582	2.218.404	2.529.686	3.058.671
Kab. Pamekasan	792.123	991.276	1.055.805	1.219.849	1.527.493
Kab. Pasuruan	1.134.899	1.379.807	1.576.301	1.819.738	2.207.798
Kab. Ponorogo	924.089	1.074.005	1.270.454	1.452.192	1.704.809
Kab. Sampang	805.379	897.276	973.843	1.102.953	1.364.736
Kab. Trenggalek	794.523	948.218	1.059.583	1.206.678	1.498.350
Kota Blitar	430.870	525.195	542.714	612.552	703.296
Kota Malang	988.288	1.102.656	1.356.370	1.524.847	1.764.865
Kota Mojokerto	389.754	444.049	515.966	568.901	689.559
Kota Batu	410.225	446.028	495.995	553.618	703.680
Provinsi Jawa Timur	9.777.104	11.493.376	15.401.494	17.411.309	20.772.484

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah penulis)

Dari tabel IV. 6 dapat dilihat TPD Kabupaten Malang adalah yang tertinggi yaitu berjumlah 1.665.126 triliun pada tahun 2010 dan yang terendah yaitu Kota Mojokerto berjumlah 389.754 miliar. Sedangkan pada tahun 2014 Kabupaten Malang TPD nya masih yang tertinggi diantara 16 kab/kota objek penelitian yaitu berjumlah 3.058.671 triliun dan yang terendah masih berada pada Kota Mojokerto yaitu berjumlah 689.559 miliar. Dari tahun 2010 hingga 2014 16 kab/kota yang menjadi objek penelitian total pendapatannya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

B. Persyaratan Analisis

Penelitian ini merupakan regresi data panel menggunakan program Eviews 8.0. kelebihan program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah, karena dapat diberlakukan sebagai data *cross section*, *time series*, maupun data panel. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman maka didapat persamaan model fix effect dalam penelitian ini.

1. Pemilihan model terbaik

a. Pengujian Signifikansi *Common Effect/Fixed Effect*

Signifikansi model *Common Effect* ataupun *Fixed Effect* dilakukan dengan cara uji *Chow*. Dari hasil uji *Chow* menggunakan *Eviews 8.0* diperoleh data dengan hasil berikut:

Tabel IV. 7
Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	503.887639	(15,62)	0.0000
Cross-section Chi-square	384.915084	15	0.0000

Sumber: Data olahan *Eviews 8.0*

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Eviews 8.0*, dengan nilai *cross-section F* sebesar 15.62 dan derajat kebebasan (d.f) sebesar 15. Menghasilkan nilai *p-value cross section period Chi-Square* sebesar 0.0000. karena *probability (p-value) Cross-section- F* sebesar $0.0000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya model terbaik yang digunakan antara *common effect* dengan *fixed effect* adalah model *fixed effect*.

b. Pengujian Signifikansi Fixed Effect/Random Effect

Dalam menentukan model mana yang terbaik untuk digunakan antara Fixed Effect atau Random effect maka dilakukan pengujian Hausman. Dari Uji Hausman yang dilakukan, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel IV. 8
Uji Hausman

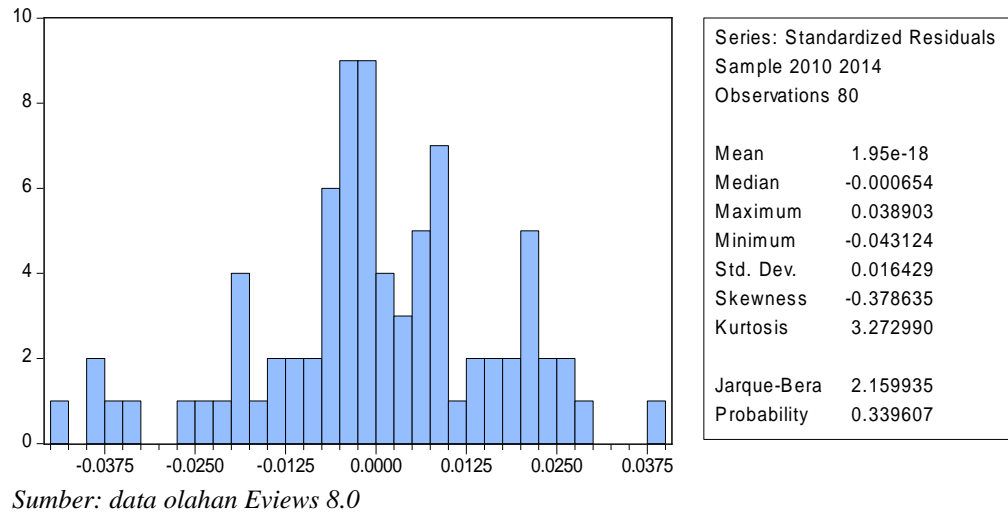
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	59.972577	2	0.0000

Sumber: Data olahan Eviews 8.0

Dari hasil perhitungan didapat bahwa Chi-Square Statistic pada *cross section random* sebesar 59.972577. Nilai derajat kebebasan chi-square (chi-sq d.f) adalah 2. Nilai Chi-Square statistic $>$ chi-Square d.f menyebabkan *p-value cross section random* mengalami nilai yang signifikan (0.000). Dikarenakan nilai *p – value cross section random* ($0.0000 < \alpha (0.05)$), sehingga dapat diambil keputusan untuk menolak H_1 dan menerima H_0 , dengan kesimpulan model *fixed effect* lebih baik digunakan dibandingkan dengan model *Random effect*.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar IV. 2

Hasil Uji Normalitas

Hasil output Eviews.8.0 menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar (1.95), dengan nilai tengah sebesar -0.000654. nilai tertinggi adalah 0.038903 dan nilai residual terendah adalah -0.043124, residual memiliki standar deviasi sebesar 0.016429. Data memiliki nilai Skewness atau kecondongan kurva sebesar -0.378635. selain itu nilai kurtosis atau keruncingan kurva sebesar 3.272990. Pada hasil pengujian normalitas indikator pengeluaran dan idikator pendapatan terhadap pertumbuhan eekonomi di 16 kab/kota Jawa Timur nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.368440 atau > 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Multikolinieritas

Tabel IV. 9
Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1.000000	0.120492
X2	0.120492	1.000000

Sumber: data olahan Eviews 8.0

Dari hasil uji multikolinieritas *eviews* 8.0 diatas, didapatkan bahwa data memiliki nilai korelasi antar variabel independen sebesar 0.12, *Rule of thumb* yang digunakan dalam uji multikolinieritas adalah apabila hasil korelasi antar variabel independen memiliki korelasi diatas 0,7 maka dapat dikatakan data memiliki masalah multikolinieritas namun apabila hasil korelasi antar independen memiliki korelasi dibawah 0.7 maka dapat dikatakan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinieritas. Jadi dapat disimpulkan hubungan antara variabel X1 dan X2 hanya sebesar 0.12. korelasi tersebut tergolong lemah dan mencerminkan bahwa data diatas tidak memiliki masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada pengujian data dilakukan Uji *White* pada *Eviews* 8.0 dengan membandingkan nilai probabilitas $Obs \cdot R\text{-squared}$ dengan taraf nyata 5 persen (0.05). hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji White

F-statistic	1.287364	Prob. F(5,74)	0.2785
Obs*R-squared	6.401864	Prob. Chi-Square(5)	0.2691
Scaled explained SS	1.972871	Prob. Chi-Square(5)	0.8529

Sumber: data olahan Eviews 8.0

Dari tabel IV.10 dapat dilihat nilai Probabilitas Obs*R-Squared sebesar 0.2691 atau > 0.05 , maka dapat disimpulkan data terbebas dari heteroskedastisitas.

d. Autokorelasi

untuk pengujian autokorelasi peneliti menggunakan metode Durbin-Watson.

Dengan cara melihat DW tabel (dU dan dL) dan membandingkannya dengan DW hitung.

Tabel IV.11
Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria yang diuji	Nilai
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.90

Sumber: data olahan Eviews 8.0

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson regresi penelitian ini adalah 1,90. menurut tabel Durbin Watson, apabila nilai statistik berada diantara 1,54 sampai 2,46 berarti H_0 diterima (tidak ada autokorelasi).

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Keberartian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan

membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang ditentukan dengan tingkat signifikansi 5%. Berikut ini adalah perhitungan uji t

Tabel IV. 12

Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.16726	0.041082	320.5081	0.0000
EXPI	-0.033746	0.008869	-3.805043	0.0003
REVI	0.013078	0.001021	12.81489	0.0000

Sumber: Data hasil olahan Eviews 8.0

Berdasarkan hasil uji t, berikut ini disajikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengujian Keberartian Koefisien Regresi Secara Parsial Indikator Kapasitas Pengeluaran (X1)

Berdasarkan perhitungan *Eviews 8.0* nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $80-2-1 = 77$, hasilnya diperoleh t_{tabel} sebesar 1.66. Dari hasil perbandingan antara t_{hitung} variabel EXPI dengan t_{tabel} terlihat bahwa t_{hitung} (-3,805043) dan t_{tabel} (-1,66) apabila peneliti mengambil nilai mutlaknya maka t_{hitung} (3.805043) dan t_{tabel} (1,66) dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan hasil uji t sebelum dimutlakkan menunjukkan angka negatif maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak jadi kapasitas pengeluaran memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16kab/kota objek penelitian. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya dengan tingkat signifikansi 5% atau (0,05), maka nilai signifikan dari kapasitas pengeluaran adalah (0,0003) < (0,05) Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial kapasitas pengeluaran

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur.

2) Pengujian Keberartian Koefisien Regresi Secara Parsial indikator pengeluaran (X2)

Dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} terlihat bahwa t_{hitung} (12.81489) > t_{tabel} (1,66) yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak maka kapasitas pendapatan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari X2 adalah (0,000) < (0,05), maka H_0 ditolak. Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial kapasitas pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur tahun 2010-2014.

b. Uji Keberartian Regresi (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara simultan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Ketentuan penerimaan hipotesis secara simultan yaitu dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 13

Hasil Uji F

Kriteria yang diuji	Nilai
F-Hitung (<i>F-statistic</i>)	2047.992
<i>Prob F-statistic</i>	0.0000

Sumber: Eviews 8.0 (diolah penulis)

Menggunakan perhitungan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$. df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 (n-k-1) dimana

n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas. Dari tabel nilai kritis distribusi F dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$, dan nilai $df_1 = 2$ dan $df_2 = 77$ diperoleh F_{tabel} sebesar 3,12.

Berdasarkan perhitungan *Eviews.8.0* diketahui bahwa $F_{hitung} (2047.992) > F_{tabel} (3,12)$. Selain itu, dapat dilihat nilai probabilitas signifikansi adalah sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan indikator desentralisasi fiskal yang dilihat dari kapasitas pengeluaran dan kapasitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur tahun 2010-2014.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV.14
Hasil Uji Koefisien determinasi

Kriteria yang di uji	Nilai
<i>R-Squared</i>	0.998222
<i>Adjusted R-Square</i>	0.997735

Dari hasil analisis koefisien determinasi berdasarkan output *Eviews.8.0* diperoleh nilai R^2 sebesar 0,99 dengan R^2 yang sudah disesuaikan (*Adjusted R-Square* juga sebesar 0,99). dikarenakan nilai R^2 sebesar 0,99 maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 99%, Sedangkan 1% sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. Namun taksiran nilai *R-Squared* ataupun *adjusted R-Square* tidak bisa

dijadikan patokan utama dikarenakan terjadinya bias pada model *fixed effect* karena penambahan *dummy variabel*.

C. Pembahasan

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal yang dilihat dari kapasitas pengeluaran serta pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur. Peneliti menggunakan estimasi model *fixed effect* sebagai model terbaik dan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 13.16726 - 0.033746 \text{ EXPi} + 0.013078 \text{ REVi} + e$$

Hasil persamaan regresi di atas memiliki konstanta sebesar 13.16 yang dapat diinterpretasikan bahwa ketika rasio kapasitas pengeluaran dan rasio kapasitas pendapatan daerah adalah konstan, maka pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur sebesar 13.16 persen. Nilai koefisien EXPi atau indikator kapasitas pengeluaran yaitu -0.03 persen yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila rasio kapasitas pengeluaran daerah naik sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur akan turun sebesar 0.03 persen. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara rasio kapasitas pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Nilai koefisien REVi atau rasio kapasitas pendapatan yaitu sebesar 0.01 yang dapat diinterpretasikan apabila rasio kapasitas pendapatan naik 1% dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan, maka pertumbuhan ekonomi pada 16

kab/kota di Jawa Timur akan naik sebesar 0.01%. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa adanya pengaruh positif antara rasio kapasitas pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur.

1. Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel indikator kapasitas pengeluaran dan pendapatan memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.99 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bebas atau independen mampu menjelaskan keberagaman nilai variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur sebesar 99%. Dapat diartikan bahwa indikator kapasitas pengeluaran (X1) dan kapasitas Pendapatan (X2) memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur sebesar 99%. Kekuatan pengaruh kapasitas pengeluaran dan pendapatan dapat dibilang lemah dan kurang dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengujian hipotesis uji F didapatkan hasil $F_{hitung} = 2047.992$ sedangkan $F_{tabel} = 3,12$, sehingga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan dengan tingkat signifikansi seluruh variabel bebas berada pada 0,000 atau dibawah 0,05 (5 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas pengeluaran dan kapasitas pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan sesuai dengan arahnya masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota pada di Jawa Timur pada kurun waktu 2010 hingga 2014.

Dengan adanya hasil tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian Nobuo Akai & Masayo Sakata, Puji Wibowo, serta Freddy Situngkir dkk dimana penelitian mereka sama-sama menyimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal yang diukur melalui Indikator pengeluaran dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik yang bernilai positif maupun negatif.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan teori Oates yang menyatakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah mampu menyeleksi kebutuhan daerahnya sendiri. Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu dari sisi pengukuran desentralisasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan tidak semua negara atau daerah menunjukkan pengaruh yang positif atas adanya desentralisasi fiskal dan pengukuran yang belum tepat atau berbeda-beda.

2. Indikator Kapasitas Pengeluaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan t_{hitung} pada rasio kapasitas pengeluaran ($EXPi$) sebesar -3.80 dan $t_{tabel}(-1.66)$ apabila diambil nilai mutlaknya maka didapatkan bahwa t_{hitung} sebesar 3.80 dan t_{tabel} sebesar 1.66. dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka indikator kapasitas pengeluaran secara parsial memiliki pengaruh dengan arah hubungan negatif pada pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan perhitungan diatas hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nobuo Akai, Masayo Sakata, Puji Wibowo yang menyatakan indikator pengeluaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda yakni indikator pengeluaran menunjukkan pengaruh yang

negatif bagi pertumbuhan ekonomi di 16 kab/kota pada Jawa Timur. Pada penelitian Freddy Situngkir dkk mengenai Desentralisasi Fiskal sisi pengeluaran menemukan pengaruh negatif signifikan di Sumatra Utara, sama halnya dengan penelitian ini. Meningkatnya rasio pengeluaran atau belanja daerah akan memberikan pengaruh yang negatif pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Desentralisasi fiskal di Indonesia menitik beratkan pada sisi pengeluaran dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam hal membelanjakan APBD nya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu pengaruh belanja daerah terhadap perekonomian daerah akan sangat tergantung pada alokasi dan komposisi belanja atau pengeluaran daerah. Selama ini kualitas belanja daerah dalam APBD memang dinilai masih lemah karena belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung. Belanja langsung menurut literatur merupakan belanja yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam mengungkit dan menggerakkan roda perekonomian. Pada 16 kab/kota yang menjadi objek penelitian ini peneliti melihat hal yang sama, yakni proporsi belanja pegawai yang merupakan belanja tidak langsung masih jauh lebih besar dibanding belanja modal atau belanja langsung. Menurut penelitian lainnya yakni Faisal salah satu faktor desentralisasi dari sisi pengeluaran itu negatif adalah kurangnya peningkatan *skill* para aparatur pemerintahan daerah dan akuntabilitas politik yang lebih baik, serta penggunaan dana oleh pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah

proporsi belanja pegawai dan belanja modal total 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Tabel IV.15
Total Belanja Pegawai dan Modal 16kab/kota di Jawa Timur

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Modal
2010	8.691.455	1.984.213
2011	9.875.051	2.467.467
2012	11.326.935	3.418.886
2013	12.334.915	3.768.422
2014	13.520.025	4.848.407

Sumber: DJPK, diolah penulis tahun 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proporsi belanja modal lebih kecil dari belanja pegawai, sehingga hal ini dapat memperlambat pembangunan daerah yang berasal dari pengeluaran untuk belanja modal. Belanja modal itu sendiri terdiri dari, tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Efek negatif yang ditimbulkan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran ini juga dapat dijelaskan dalam penelitian Puji Wibowo karena kompetensi dan kapasitas pemimpin daerah yang kurang dapat mengakomodir preferensi dan kebutuhan masyarakat sehingga porsi pengeluaran atau belanja daerah menjadi tidak tepat sasaran.

3. Indikator Kapasitas Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan t_{hitung} pada rasio kapasitas pendapatan ($REVi$) sebesar 12.81 dan t_{tabel} 1.66. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka indikator kapasitas pendapatan secara parsial memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian. Indikator pendapatan yang diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)

secara statistik juga dinyatakan signifikan karena probabilitasnya < 0.05 . Menurut literatur rasio antara PAD dan TPD ini juga dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal dalam hal kemandirian daerah.

Hasil positif dan signifikan ini bertolak belakang dengan penelitian pada jurnal Freddy Situngkir dkk yang memperoleh hasil negatif pada pengukuran melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Sementara itu pada penelitian Puji Wibowo rasio PAD terhadap TPD yang pada sebelum tahun 2001 memiliki pengaruh negatif berubah menjadi positif setelah tahun 2001 dimana pelaksanaan otonomi fiskal dilaksanakan. Indikator penerimaan ini juga dapat mencerminkan kemandirian daerah atau dalam literatur rasio PAD terhadap TPD menggambarkan derajat desentralisasi fiskal.. Berikut ini adalah hasil rasio PAD dibagi TPD sebagai cerminan derajat desentralisasi fiskal.

Tabel IV. 16
Rasio PAD/TPD

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Blitar	5,87	6,15	6,94	7,21	9,80
Kab. Bojonegoro	6,56	10,91	8,56	10,66	11,57
Kab. Jember	9,80	9,70	11,92	13,03	15,75
Kab. Lamongan	8,95	7,53	8,78	9,62	13,83
Kab. Madiun	5,41	6,47	6,66	7,05	8,76
Kab. Magetan	6,49	6,49	7,24	7,17	9,59
Kab. Malang	7,84	8,83	8,89	10,37	13,44
Kab. Pamekasan	6,23	7,13	7,99	7,33	11,23
Kab. Pasuruan	8,84	11,25	12,36	15,29	19,09
Kab. Ponorogo	5,27	6,14	8,56	9,23	11,66
Kab. Sampang	4,52	5,24	6,27	6,02	9,02
Kab. Trenggalek	6,74	6,65	6,63	6,45	8,87
Kota Blitar	11,07	10,01	11,73	11,89	14,61
Kota Malang	11,48	16,85	16,94	20,84	21,11
Kota Mojokerto	8,11	9,50	10,36	13,17	15,27
Kota Batu	4,32	6,78	7,82	10,76	11,44

Sumber: DJPK, diolah penulis tahun 2016.

Dari Tabel rasio PAD/TPD dapat dilihat bahwa rata-rata dibawah 20% dari pendapatan yang diterima oleh 16 kab/kota tersebut yang berasal dari pendapatan asli daerah dan sisanya rata-rata lebih dari 80% merupakan berasal dari dana perimbangan yang diperoleh dari pusat sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era otonomi daerah. Komposisi PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan harus dapat digali semaksimal mungkin oleh daerah karena semakin meningkatnya derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan atau pendapatan akan berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi apabila kebebasan untuk daerah dalam menggali PAD nya dilaksanakan dengan benar sehingga semakin terdesentralisir pendapatan daerah akan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

